



BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2025 Page 2150-2159

DOI: <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1214>

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Pembayaran Pajak STNK Tahunan

Andi Reskia Nur Hidayah¹, Ardiensyah²

^{1,2} Program Studi Keuangan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

✉ Corresponding author

andireskianurhodayah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuat penulis atau pun pembaca memahami Bagaimana kesadaran pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak tahunan kendaraan bermotor (STNK). Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan Teknik wawancara dan observasi, Penelitian ini menggali pandangan maupun pengalaman sejumlah wajib pajak di wilayah Kecamatan panakukang kota makassar melalui wawancara maupun observasi. Hasil penelitian ini pun menunjukkan bahwa Tingkat kesadaran pajak sangat dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, seperti pemahaman terhadap fungsi pajak, persepsi terhadap playanan samsat, dan sanksi yang diterap kan. Diketahui pula bahwa Sebagian besar wajib pajak menyadari seberapa pentingnya membayar pajak, namun masih terdapatnya beberapa kendala dalam kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak STNK seperti kurangnya informasi Masyarakat dalam memahami wajib pajak STNK dan faktor ekonomi yang mempengaruhi Keputusan membayar tepat waktu. Temuan ini menekan kan perlunya strategi komunikasi yang lebih efektif dan pendekatan partisipatif dalam meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan pajak Masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Pajak, Kendaraan Bermotor, STNK Tahunan, Kepatuhan Wajib

Abstract

This study aims to help both the author and readers understand how tax awareness influences taxpayer behavior in paying the annual motor vehicle tax (STNK). Therefore, the researcher employed a descriptive qualitative approach using interview and observation techniques. This research explores the perspectives and experiences of several taxpayers in the Panakkukang District of Makassar City through interviews and direct observation. The findings of this study indicate that the level of tax awareness is significantly influenced by several factors, such as understanding of the function of taxes, perceptions of the services provided by SAMSAT, and the enforcement of penalties. It was also found that while most taxpayers are aware of the importance of paying taxes, there are still challenges in fostering public awareness regarding the annual STNK tax. These challenges include a lack of information about tax obligations and economic factors that influence timely payment decisions. These findings highlight the need for more effective communication strategies and participatory approaches to enhance public tax awareness and compliance.

Keywords: Tax Awareness, Motor Vehicles, Annual STNK, Taxpayer Compliance, Panakkukang District, Makassar City.

PENDAHULUAN

Masyarakat yang tertib serta patuh akan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, menjadi salah satu sasaran dan tujuan utama pemerintah Indonesia, untuk tercapainya tujuan tersebut maka pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Pembangunan berkelanjutan dan dibutuhkan anggaran untuk merealisasikannya. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk bertujuan meningkatnya penerimaan negara, salah satunya adalah dengan menargetkan pendapatan yang berasal dari negeri itu sendiri yaitu dengan pajak, pajak juga menjadi iuran bagi Masyarakat yang dipaksakan dengan kontraprestasi dan digunakan untuk pengeluaran umum pemerintah. (Ahmad et al., 2021)

Tingkat kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak STNK masih menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah. Di sebabkan Masyarakat masih lalai akan hal itu, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang tidak melakukan pembayaran wajib pajak secara tepat waktu dan menunggak pembayaran wajib pajak dengan jangka waktu yang cukup lama. Ada pula faktor yang diduga cukup berpengaruh terhadap perilaku ini yaitu salah satunya adalah Tingkat kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak(Hidayat & Wati, 2022). Sedangkan kesadaran pajak itu sendiri mencerminkan kepedulian, pemahaman, dan kesadaran Masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Selain dari kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak, ada pula faktor lain seperti sanksi administrasi perpajakan turut mempengaruhi Tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang jelas dan tegas sangat dapat jadi pendorong untuk Masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu(Wardani & Rumiyatun, 2017). Penelitian di samsat kota makassar provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa sanksi administrasi perpajakan sangat berpengaruh untuk masyarakat membayar pajak secara tepat waktu dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran wajib pajak bagi seluruh Masyarakat dalam membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi pembaca maupun pemerintah daerah dalam merancang kebijakan perpajakan yang efektif guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan roda dua (motor).

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, khususnya dalam menggali faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor (STNK) tahunan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan dan pengamatan di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang dipilih secara purposive karena wilayah ini merupakan salah satu kawasan dengan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi dan memiliki variasi perilaku kepatuhan wajib pajak. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada 21 April hingga 5 Mei 2025

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria informan antara lain:

- 1) Merupakan warga Kecamatan Panakkukang.
- 2) Memiliki kendaraan bermotor roda dua atau roda empat yang wajib membayar pajak tahunan.
- 3) Pernah atau secara rutin membayar pajak STNK tahunan.
- 4) Bersedia diwawancarai dan memberikan informasi yang diperlukan.

Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip *data saturation*, yakni ketika data yang diperoleh dari wawancara sudah tidak menunjukkan variasi atau informasi baru.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- 1) Wawancara Mendalam (In-depth Interview)
Digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan wajib pajak terkait kesadaran dan kepatuhan terhadap pembayaran pajak STNK. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel.
- 2) Observasi
Peneliti melakukan pengamatan langsung di kantor Samsat serta lingkungan tempat tinggal informan untuk mendapatkan data mengenai kondisi pelayanan, pola interaksi petugas dan wajib pajak, serta perilaku pembayaran pajak.
- 3) Dokumentasi
Dokumentasi berupa foto, catatan lapangan, serta referensi sekunder seperti brosur layanan Samsat atau laporan tahunan terkait kepatuhan wajib pajak juga digunakan sebagai pelengkap data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggambarkan secara mendalam bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor (STNK) tahunan di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berperan dalam mendorong atau menghambat kepatuhan pembayaran pajak. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dari wawancara dan observasi terhadap sejumlah wajib pajak di wilayah tersebut. Berdasarkan data realisasi dan persentase kepatuhan pajak kendaraan bulan Januari 2025 di Kecamatan

Panakkukang, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong sedang, dengan rata-rata kepatuhan unit kendaraan sebesar 65,14% dan kepatuhan berdasarkan nilai PKB Pokok hanya 19,71%. Berikut adalah pembahasan terhadap beberapa temuan penting dalam penelitian

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kecamatan Panakukkang

Berdasarkan data bulan Januari, jumlah total kendaraan bermotor yang menjadi potensi pajak di Kecamatan Panakkukang mencapai 8.451 unit, terdiri dari 5.978 kendaraan roda dua dan 2.473 kendaraan roda empat, dengan total potensi pajak pokok sebesar Rp7,33 miliar. Namun, realisasi pembayaran hanya mencapai 5.505 unit atau sekitar 65,14% dari total unit, dan total realisasi pajak sebesar Rp1,44 miliar atau hanya 19,71% dari total potensi PKB pokok. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan dalam jumlah unit lebih tinggi daripada kepatuhan dalam nilai rupiah, yang berarti banyak kendaraan yang membayar pajak adalah kendaraan dengan nilai pajak rendah, seperti roda dua.

Pemahaman masyarakat tentang pajak memiliki korelasi yang erat dengan tingkat kesadaran mereka untuk patuh membayar pajak. Wajib pajak yang memahami bahwa pajak merupakan sumber pendanaan utama negara untuk pembangunan dan penyediaan layanan publik cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi untuk membayar pajak secara tepat waktu (Amri & Syahfitri, 2020). Sebagian besar responden menunjukkan pemahaman bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ditemukan adanya kesenjangan pemahaman di kalangan wajib pajak yang cenderung melihat pajak hanya sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan (Sanadi et al., 2024). Tingkat kepatuhan ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat tentang pajak. Masyarakat yang tahu bahwa pajak digunakan untuk membangun jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya, cenderung lebih rajin membayar pajak tepat waktu.

Sebagian responden menunjukkan pemahaman dasar bahwa pajak mendanai pembangunan, namun masih banyak yang hanya patuh karena kewajiban administratif, bukan kesadaran kontribusi aktif. Ketidaktahuan terhadap fungsi strategis pajak ini menyebabkan sebagian wajib pajak menganggap enteng kewajiban membayar pajak STNK (Nafiah & Warno, 2018). Beberapa responden bahkan mengakui hanya membayar saat

diperlukan untuk keperluan administratif, seperti perpanjangan SIM atau jual beli kendaraan. Kurangnya edukasi yang berkelanjutan tentang fungsi dan manfaat pajak menjadi salah satu penyebab lemahnya pemahaman ini. Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang menyeluruh diperlukan untuk membentuk kesadaran kolektif mengenai arti penting pajak dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Persepsi terhadap Layanan Samsat

Pelayanan publik yang diterima wajib pajak saat membayar pajak di kantor Samsat juga sangat memengaruhi persepsi dan sikap mereka terhadap pajak itu sendiri. Masyarakat yang merasakan pelayanan cepat, ramah, dan tidak berbelit-belit, cenderung memiliki persepsi positif yang mendorong mereka untuk lebih taat dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak bervariasi antar kelurahan. Kelurahan dengan tingkat kepatuhan tertinggi dalam unit adalah Sinrijala (81,86%), sementara yang paling rendah adalah Karuwisi Utara (47,90%). Dari sisi realisasi nilai pajak, Sinrijala juga mencatat angka tertinggi (29,29%), sedangkan Karuwisi Utara terendah (14,40%).

Tingkat kepatuhan tinggi ini berpotensi berkaitan dengan kesadaran pajak yang lebih baik, akses terhadap informasi, dan/atau efisiensi pelayanan di Samsat terdekat. Sebaliknya, kepatuhan rendah bisa mengindikasikan minimnya pemahaman manfaat pajak, ketidakpuasan terhadap pelayanan, atau beban ekonomi.

Sebaliknya, beberapa wajib pajak mengeluhkan proses birokrasi yang panjang, antrean yang melelahkan, dan kurangnya informasi yang jelas saat berada di Samsat. Hal ini menandakan bahwa persepsi negatif terhadap layanan Samsat masih menjadi hambatan psikologis dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Beberapa wajib pajak bahkan memilih jasa pihak ketiga (calo) karena merasa sistem terlalu birokratis. Ditemukan pula praktik penggunaan jasa perantara (calo) sebagai cara pintas untuk menghindari birokrasi, yang justru mengaburkan esensi kepatuhan pajak sebagai bentuk kesadaran pribadi.

3. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Pembayaran Pajak STNK

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memainkan peran signifikan dalam kepatuhan membayar pajak. Beberapa poin temuan:

- 1) Pemahaman terhadap fungsi pajak, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tahu pajak penting untuk pembangunan, namun tidak mengetahui konsekuensi keterlambatan.

- 2) Pelayanan SAMSAT, keluhan terkait antrean panjang, informasi tidak jelas, dan keterbatasan akses digital turut menjadi hambatan bagi wajib pajak untuk membayar tepat waktu.
- 3) Faktor ekonomi, banyak wajib pajak kendaraan roda dua mengalami kesulitan membayar karena prioritas kebutuhan harian lebih mendesak.

Hal ini menjelaskan mengapa realisasi dalam jumlah unit tinggi, namun nilai pajak yang terkumpul rendah karena kendaraan bernilai rendah yang pajaknya kecil lebih mudah dibayar oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran pajak dinilai cukup efektif dalam memengaruhi perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui adanya sanksi biasanya terdorong untuk membayar pajak agar tidak terkena beban tambahan.

Namun, ada juga temuan menarik bahwa efek jera dari sanksi administratif belum maksimal, terutama pada wajib pajak yang merasa sanksi tersebut dapat ditoleransi secara finansial. Ini menandakan perlunya optimalisasi penerapan sanksi yang bersifat progresif dan edukatif agar tidak sekadar menjadi beban, tetapi juga alat pembelajaran sosial.

4. Kendala Sosial dan Ekonomi

Selain faktor pemahaman, persepsi layanan, dan sanksi, terdapat pula dua kendala utama yang melemahkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak STNK, yaitu:

a) Kurangnya Informasi

Sebagian wajib pajak tidak memiliki akses informasi yang cukup terkait prosedur pembayaran pajak STNK, termasuk metode pembayaran daring, lokasi gerai Samsat keliling, dan jadwal layanan. Akibatnya, mereka cenderung menunda-nunda atau bahkan melewatkan kewajiban tersebut karena merasa tidak tahu atau tidak paham apa yang harus dilakukan. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi komunikasi publik yang lebih efektif, baik melalui media sosial, RT/RW, tokoh masyarakat, maupun sistem pemberitahuan SMS/email secara langsung kepada wajib pajak.

b) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan wajib pajak. Masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan dengan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Beberapa informan mengaku bahwa mereka menunda pembayaran selama berbulan-bulan karena keterbatasan keuangan. Dalam hal ini, diperlukan

kebijakan insentif atau program keringanan pajak tertentu (misalnya diskon denda atau program pemutihan) yang bisa meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong mereka untuk kembali patuh.

5. Implikasi terhadap Strategi Pemerintah

Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan komunikasi yang lebih efektif, termasuk kampanye kesadaran pajak yang disesuaikan dengan karakteristik lokal masyarakat. Dibutuhkan strategi partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, RT/RW, dan media lokal untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.

Edukasi melalui sekolah dan komunitas juga menjadi strategi jangka panjang yang dapat membentuk kesadaran pajak sejak dini. Pemerintah daerah melalui Bapenda atau Samsat perlu melakukan inovasi komunikasi publik agar informasi tidak hanya sampai, tetapi juga dipahami dan diterima masyarakat.

Temuan-temuan di atas menekankan pentingnya pembaruan dalam strategi komunikasi dan edukasi pajak. Strategi satu arah seperti hanya menyampaikan informasi melalui balihho atau brosur dirasa tidak cukup. Pemerintah perlu mengadopsi strategi komunikasi dua arah dan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Contoh strategi tersebut antara lain:

- 1) Dialog langsung di tingkat kelurahan atau RW.
- 2) Sosialisasi melalui komunitas pemuda dan keagamaan.
- 3) Kampanye digital yang interaktif.
- 4) Pelibatan tokoh masyarakat sebagai agen penyadaran pajak.

Pendekatan ini diyakini lebih efektif karena masyarakat akan merasa dilibatkan, didengarkan, dan diposisikan sebagai mitra aktif dalam pembangunan daerah melalui pajak.

SIMPULAN

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak merupakan variabel kunci yang sangat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan

bermotor tahunan. Kesadaran tersebut terbentuk dari pemahaman terhadap fungsi pajak, persepsi terhadap layanan publik (Samsat), serta efektivitas sanksi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berikut Kesimpulan secara keseluruhan dari beberapa indikator yang di analisis

Tabel 1 Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Fungsi Pajak di Kecamatan Panakukkang

Indikator Kesadaran Pajak	Temuan Utama	Dampak terhadap Pembayaran
Pemahaman tentang pajak	Rendah, belum tahu fungsi pajak secara menyeluruh	Kepatuhan rendah di beberapa kelurahan
Sosialisasi	Belum merata dan belum rutin	Pengetahuan warga terbatas
Sanksi	Diketahui, tapi tidak semua takut	Banyak menunggu pemutihan
Kemudahan Akses	Sistem belum sepenuhnya efisien	Wajib pajak menunda bayar
Partisipasi Kelurahan	Minim koordinasi	Potensi penguatan belum maksimal

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi administratif, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan akses informasi, dan pendekatan edukatif yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang kuat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/542>
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota

Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>

- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Sanadi, P. Y. F., S, F., & Djunaedi, D. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 19(1), 55–71. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.377>
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>